

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Endro P., Didik, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019.
- Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Nurahmad, Much., *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Oetomo, Gunawan, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Grafika Press, Jakarta, 2004.
- Poerwanto, Helena, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Priambada, Komang, *Outsourcing Versus Serikat Pekerja? (An Introduction to Outsourcing)*, Alihdaya Publishing, Jakarta, 2008.
- Ramli, Lanny, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Salam, Moch. Faisal, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Suardi, Rudi, *Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, PPM, Jakarta, 2007.
- Suhardi, Gunarto, *Perlindungan Hukum bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

Uwiyono, Aloysius, *Asas-Asas Hukum Perburuhan Edisi Kedua*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubungan Dengan Hubungan Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5309).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2019).

Surat Edaran B.31/PHIJSK/I/2012 tentang tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

PUTUSAN

Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011.

JURNAL

Endroyo, Bambang, *Peranan Manajemen K3 dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi*, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. III, No. 1, 2006.

- Kuniarti, Siti, *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.1, 2009.
- Niyoga, *Penerapan Good Corporate Governance dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Alih Daya antara PT. PLN (Persero) dengan Perusahaan Penyedia Jasa*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VII, No.1, 2019.
- Noor, Andi Reza Alief Chairin, *Aspek Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Tenaga Kerja di UD.Dinamis Abadi Kota Palu*, *PROMOTIF:Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Paramita, Catarina Cori Pradnya, *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. PLN (PERSERO) APJ Semarang*:*Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. I, No. 1, 2012.
- Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, *MMH*, jilid 44, No. 44, Padang, Oktober, 2015.
- Wati, Dwi Liza, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Outsourcing berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011*, *Jurnal Online Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No.1, 2015.

INTERNET

- Kusumasari, Diana *Perlindungan Hukum bagi Pekerja outsourcing Pasca-Putusan MK*”, www.hukumonline.com, 31 Januari 2012.
- Pangaribuan, Juanda, “*Legalitas Outsourcing Pasca Putusan MK*”, www.hukumonline.com, 27 Februari 2017.
- Sutarno, “*Kecelakaan Konstruksi: Di Indonesia 7 Orang Meninggal per Hari*”, ekonomi.bisnis.com, 8 Februari 2013.